

Banyak Permohonan Dispensasi Nikah

KEBUMEN (KR) - Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin/nikah di Pengadilan Agama (PA) Kebumen cukup memprihatinkan. Di tahun 2021, perkara bagi calon pengantin laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 tahun, tercatat 280 perkara. Meski begitu, angka tersebut turun jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 304 perkara. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Kebumen, Suryadi, saat peluncuran inovasi Pelayanan Khusus Administrasi Pengadilan di Tingkat Desa (Pakades), serta penandatanganan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kebumen Menuju Wilayah Bersih Melayani (WBBM) bersama jajaran Forkopimda di PA Kebumen, Selasa (11/1). Suryadi mengatakan, Pakades memberi pelayanan pendaftaran perkara, mulai dari pelayanan Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum), perkara prodeo bagi masyarakat tidak mampu, pelayanan sidang di luar gedung pengadilan, pelayanan informasi dan pengaduan, serta pelayanan penyerahan produk pengadilan.

"Kemudahan layanan bukan memberi kemudahan untuk bercerai, tetapi kemudahan layanan proses pendaftarannya, juga kemudahan layanan bantuan hukum karena ada Pos Bakum, serta kemudahan pelayanan untuk masyarakat kurang mampu dalam perkara prodeo," jelasnya. Pakades yang memberi kemudahan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PA maupun kesulitan transportasi ke PA, sekaligus menjawab banyaknya jumlah perkara yang ditangani PA Kebumen. Di tahun 2021, disebutkan ada 3.381 perkara. Khusus perkara perceraian, 2.729 perkara yang terdiri 632 perkara cerai talak atau suami sebagai pihak yang mengajukan cerai atas istrinya, dan 2.097 perkara cerai gugat atau istri sebagai pihak yang menggugat suaminya. Peluncuran Pakades dihadiri Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Bupati juga menandatangani nota kesepakatan sebagai bentuk dukungan Pemkab Kebumen terhadap layanan Pakades. Harapan bupati, pelayanan yang semakin baik dan memuaskan diikuti turunnya kasus perceraian. (Suk)

Pemprov Jateng Bangun Rumah Warga Miskin



KR-Budiono

Gubernur Ganjar Pranowo meninjau hasil pembangunan rumah sehat layak huni.

SEMARANG (KR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menggenjot pembangunan rumah sehat layak huni (RSLH). Pada awal menjabat, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin menargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 sebanyak 1.582.024 rumah diperbaiki. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Rabu (12/1) menyampaikan hingga akhir 2021, pembangunan rumah warga tidak mampu sudah mencapai 755.000 unit. Jadi tinggal tersisa 827.009 unit untuk diselesaikan. Pembangunan RSLH merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menilai, pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai selama beberapa bulan kurang efektif. "Di Jateng kita tambah dengan pembangunan rumah sehat layak huni," tutur Ganjar Pranowo.

Dalam program RSLH, Jateng melaksanakannya dengan sistem gotong royong, baik secara anggaran maupun pelaksanaannya. Dalam hal anggaran berasal dari berbagai sumber, yaitu dana dari APBN, APBD Jateng, APBD kabupaten dan kota, serta dari Baznas dan CSR perusahaan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan gotong royong warga. Menurut Ganjar Pranowo, spirit gotong royong juga dapat dibangun melalui program yang dilakukan ini. Contohnya pelaksanaan jambanisasi, pemasangan listrik hingga perbaikan rumah juga bisa melibatkan swasta. (Bdi)

Desa Jabung Menuju Desa Mandiri

KLATEN (KR) - Desa Jabung Kecamatan Gantiwaro, Klaten, berevolusi menuju Desa Mandiri. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak. Kades Jabung Pramono Hadi, di sela deklarasi Jabung Menuju Desa Mandiri, Selasa (11/1) mengemukakan pihaknya telah melakukan empat kegiatan menuju Desa Mandiri. Yakni, deklarasi Desa Damai, kerja sama dengan Wahid Foundation.

Hal itu untuk mewujudkan kedamaian, mencegah terjadinya konflik di masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi untuk meminimalisir paham ekstremisme & radikalisme, dengan kegiatan pemberdayaan perempuan. Launching Jabung Desa Digital, kerja sama dengan Universitas Budi Luhur Jakarta dalam program Kampus Merdeka. Hal ini untuk mewujudkan digitalisasi Desa Jabung, memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pemerintahan, serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Peresmian Rumah Kompos, bantuan dari Pertamina Foundation. Rumah Kompos terintegrasi dengan budidaya pertanian yang dilakukan oleh BumDes Jabung Makmur. Bahan baku dari sampah rumah tangga yang diambil oleh BumDes dari rumah-rumah warga, kemudian dipilah dan diolah di rumah kompos. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Panen perdana hortikultura di Desa Jabung.

Tanah Longsor di Sejumlah Desa di Temanggung

TEMANGGUNG (KR) - Bencana alam tanah longsor terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Temanggung sebagai dampak hujan deras berintensitas tinggi mengakibatkan tanah tidak mampu menahan air. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Toifur Hadi Wuryanto mengatakan bencana alam tanah longsor terjadi di setidaknya 4 desa di tiga kecamatan.

"Tidak ada korban jiwa dan luka, namun sebagian korban terpaksa mengungsi di rumah famili karena rumahnya rusak dan membahayakan jika ditempati," kata Toifur Hadi Wuryanto, Rabu (12/1).

Toifur mengatakan desa yang terjadi tanah longsor tersebut yakni Desa Tempuran, Tleter, Bandunggede dan Karangwuni. Bencana tanah longsor sendiri terjadi pada Selasa (11/1) sore di saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi.

Dikemukakan di Kecamatan Kaloran bencana tanah longsor terjadi di Dusun Kemloko RT 01 RW 3 Desa Tempuran. Kejadian sekitar pukul 17.00 WIB.

"Ada pergerakan tanah dan menimbulkan retakan di tebing belakang rumah panjang 30 meter dengan volume retakan panjang 12 meter dan lebar retakan 1 meter," katanya. Ada 4 rumah terancam terkena longsor yakni milik Taslikah (60), Sapuan (65), Musilin (50) dan Asmaun (60). Kerugian mencapai Rp 100 juta. Bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Batur-sari Rt 7 Rw 3 Desa Tleter pada pukul 15.00 WIB. Longsor pada senderan tebing depan rumah Bapak Purwoto yang menimpa rumah di bawahnya yakni milik Juweni (35) dan Rubadiah (65).

Di Kecamatan Pringsurat longsor terjadi di Dusun Gedawang dan Dusun Glandangan Desa Karangwuni. Di tempat ini longsor terjadi di 4 titik. Tanah long-

sor menimpa sejumlah bangunan rumah yang ada di bawahnya di Dusun Glandangan. Di Dusun Gedawang 2 Rt 02/08 Karangwuni, tanah yang longsor adalah milik Harun (63). Tanah itu sepanjang 8 meter, lebar 6 meter dan tinggi 6 meter yang merusak rumahnya sendiri. Kondisi rumah masih bisa di-

tempati tetapi perlu waspada jika terjadi longsor susulan.

Di Dusun Gedawang 2 tanah longsor juga menutup akses jalan dari menuju kantor Desa Karangwuni. Akibat kejadian tersebut tidak bisa dilewati truk dan mobil muatan sementara waktu. Kerugian mencapai Rp 1 juta. Volume longsor

dengan panjang 7 meter, lebar 2 meter dan tinggi 4 meter. Di Dusun Glandangan Desa Karangwuni, longsor juga membuat akses jalan dari Dusun Glandangan, Desa Karangwuni ke Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan terganggu dan harus harus memutar. Kerugian Rp 2 juta. (Osy)



KR-Istimewa

Petugas berusaha membersihkan puing-puing akibar bencana tanah longsor.

Penertiban Karaoke 'Liar' Terkendala Regulasi

PURWOREJO (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Purworejo kesulitan menertibkan usaha karaoke tanpa izin alias 'liar' yang beroperasi di wilayahnya.

Satpol PP terhambat tidak adanya regulasi di tingkat kabupaten untuk dijadikan landasan hukum penertiban tempat usaha itu. Kepala Satpol PP dan Damkar Hariyono mengatakan, pihaknya hanya bisa menertibkan karaoke dengan landasan hukum Perda K3 dan Perda Miras tentang pembe-

rantasan minuman keras. "Ketika ada pelanggaran terkait Perda K3 dan Perda Miras, kami selalu bergerak untuk menindak, tapi terkait dengan izin atau legalitas operasi karaoke, Satpol PP tidak berwenang menertibkan," ungkapnya, Rabu (12/1).

Menurutnya, regulasi terkait

perizinan karaoke itu baru tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen). Kabupaten Purworejo belum memiliki perda maupun Perbup yang mengatur tentang izin karaoke.

Satpol PP dan Damkar, katanya, telah duduk bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas persoalan izin karaoke. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten 1 Setda Purworejo. Rapat, tidak sekadar

membahas terkait viralnya video pemandu lagu di salah satu karaoke yang memakai baju putih abu-abu.

"Pertemuan kemarin menyikapi tentang usaha karaoke secara umum di Purworejo," ucapnya. Berdasarkan hasil koordinasi lintas OPD, Satpol PP mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan jajaran Polres Purworejo untuk bisa mengambil tindakan terhadap karaoke tanpa izin. (Jas)

Anak-Anak Semangat Mengikuti Vaksinasi

MAGELANG (KR) - Meskipun tinggal di kawasan pegunungan wilayah Kabupaten Magelang, anak-anak nampak bersemangat mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19, di Kantor Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Selasa (11/1).

Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, Kapolres Magelang AKBP M Sajarod Zakun SH SIK juga memantau kegiatan tersebut.

Kepala Desa Banyusidi Waluyo kepada KR di sela-sela kegiatan vaksinasi mengatakan ada sekitar 1.303 yang mengikuti vaksinasi di Kantor Desa Banyusidi. Diantara jumlah tersebut ada 111 anak usia 6-11 tahun yang mengikuti vaksinasi dosis 1, sedang 1.192 orang de-



KR-Thoha

Bupati Magelang didampingi Kapolres Magelang menyaksikan vaksinasi Covid-19 terhadap beberapa anak di wilayah Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

was dan lansia yang mengikuti dosis 2.

Pada Rabu (12/1) di lokasi yang sama juga dilaksanakan vaksinasi untuk anak jumlah sekitar 481 anak dan 2 SD dan 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Dibenarkan, masyarakat Desa Banyusidi sangat antusias mengikuti vaksinasi Covid-19.

Bupati Magelang didampingi Kapolres Magelang mengatakan pihaknya memastikan vaksinasi untuk dosis 2 dewasa dan orangtua serta dimulainya vaksinasi untuk anak-anak.

Untuk target di tingkat Kabupaten Magelang pada Bulan Januari 2022 ini, untuk anak-anak yang jumlahnya sekitar hampir 111 ribuan, selesai semua. Ini dipersiapkan untuk langkah berikutnya, yaitu persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pada saat itu diharapkan PTM sudah dapat dilakukan 100 persen.

Tetapi semuanya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak terjadi penularan-penularan lagi sehingga dapat melakukan aktivitas dan membangun sektor ekonomi secara bersama dengan baik," tegas Bupati Magelang. Juga dikatakan, vaksinasi orang dewasa dan lansia untuk dosis 1 dan dosis 2 tetap berjalan. Di sisi lain, untuk anak-anak juga dipersiapkan. Capaian untuk dosis 1 di wilayah Kabupaten Magelang sekitar 74-75 persen, dan ini terus didorong agar herd immunity semakin tinggi dan tidak ada penyebaran Covid-19. (Tha)

Produk Berjangka Semakin Diminati



KR-Sugeng Irianto

Mia Amalia

Minat masyarakat untuk mengenal beragam produk derivatif komoditi semakin tinggi seiring dengan edukasi yang luas dan berkembangnya tren dari beragam produk investasi berjangka saat ini.

Tantangan ini-pun membuka peluang lapangan kerja yang menjanjikan sebagai tenaga Wakil Pialang Berjangka (WPB) di Indonesia. Kekurangan tenaga WPB di perusahaan pialang berjangka terlihat dari sepihnya minat generasi muda terhadap profesi ini.

Pimpinan Cabang PT Rifan Financindo Berjangka Semarang Mia Amalia kepada pers Di Semarang, Selasa (11/1), menjelaskan jumlah WPB yang ideal di satu perusahaan pialang adalah 200 orang/tahun. Namun yang tereserap baru sekitar 25 persennya.

Padahal market share bisnis di Perdagangan Berjangka Komoditi masih kecil sekali, dari total sekitar 70 perusahaan pialang berjangka yang terdaftar di Bappebti baru menguasai ceruk pasar 5 persen dari total potensi yang ada. (Sgi)

Warga Terdampak Bendungan Bener Datangi DPRD

PURWOREJO (KR) - Ratusan warga terdampak Bendungan Bener yang tergabung dalam Masterbend kembali mendatangi Gedung DPRD Purworejo, Selasa (11/1) siang. Mereka datang mengawal proses mediasi antara perwakilan Masterbend dengan pihak pemerintah yang diwakili BPN Purworejo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang difasilitasi DPRD Purworejo.

Dalam unjuk rasa tersebut, peserta aksi berorasi secara bergantian dan memutar lagu mars Masterbend. Sementara mediasi dilakukan di dalam ruang rapat Gedung B DPRD Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiyabudi memimpin mediasi tersebut. Dalam mediasi tersebut,

didiskusikan tentang kelanjutan rencana gugatan kasasi pihak tergugat atau pemerintah yang diwakili BPN Purworejo ke MA. Kasasi menindaklanjuti putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jateng yang memenangkan gugatan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener.

Mediasi menghasilkan keputusan guna mendorong Menteri ATR/BPN menerbitkan diskresi untuk dilakukannya penilaian ulang atas 176 bidang tanah terdampak bendungan. Adapun kasasi akan tetap diajukan pihak tergugat. Ketua DPRD Purworejo mengatakan, pihak BPN Purworejo berkomitmen untuk mencabut gugatan apabila Menteri ATR/BPN menerbitkan diskresi. "Komitmentnya adalah mendorong menteri

menerbitkan diskresi, seperti dilakukan beberapa waktu lalu, setelah itu BPN akan mencabut kasasi," tuturnya.

Sementara menunggu proses diskresi dan penilaian ulang, warga terdampak menuntut lahan yang belum terbayarkan untuk tidak disentuh pekerjaan bendungan. Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo menuturkan, warga akan mematok lahan yang belum dibayar dan akan mengolahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pematokan itu bukan untuk tujuan menghentikan pembangunan bendungan, namun warga hanya ingin melindungi tanah yang masih menjadi hal miliknya. "Kami tidak akan mematok sendiri, tapi harus

didampingi pihak BPN Purworejo karena mereka yang tahu batas tanah yang bermasalah dan di luar penlok itu. Kami tidak mau ada anggapan warga menghentikan pembangunan bendungan," tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan

Sumber Air (PJSA) BBWSO Yosianti Budi Wicaksono didampingi Kepala BPN Purworejo Andri Kristanto, mengemukakan, pihaknya sepakat untuk mencabut kasasi saat diskresi Menteri ATR/BPN turun. Diskresi, katanya, akan menjadi dasar untuk melakukan reapraisal. (Jas)



KR-Jarot Sarwosambodo

Warga terdampak Bendungan Bener berunjuk rasa di halaman DPRD Purworejo.